
Memoria Passionis

Laporan dan Analisis:
Peristiwa Kekerasan 28 September 2001
di Kecamatan Ilaga,
Kabupaten Puncak Jaya

DISUSUN OLEH:

**SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

Jayapura
April 2002

Kepada Yang Terhormat

Bpk. Jaap Solossa M.Si
Gubernur Provinsi Papua
Di Jayapura

Salam sejahtera,

Kembali kami, para pemimpin Gereja-gereja di Papua, menghadap Bapak untuk menyampaikan keadaan masyarakat dan umat kami yang mengalami peristiwa kekerasan di Ilaga. Seluruh kejadian berikut latarbelakang, analisis, dan rekomendasinya kami sampaikan dalam ***“Laporan dan analisis : peristiwa kekerasan 28 September 2001 di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya”***.

Setelah sekian banyak laporan peristiwa kekerasan yang kami sampaikan maupun oleh kalangan LSM, ternyata peristiwa serupa tetap saja terjadi tanpa ada penanganan yang tuntas dan berjangka panjang. Kami amat prihatin dengan kenyataan tersebut sehingga minta dengan sangat **agar pemerintah segera mengambil langkah yang efektif guna memulihkan situasi dan terlebih harga diri masyarakat Papua, khususnya di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya** yang hingga kini masih mengalami dampak buruk akibat peristiwa kekerasan yang kami laporkan di bawah ini.

Sebagai para pemimpin Gereja, kami membuka diri untuk ambil bagian dalam upaya pemulihan keadaan sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan panggilan kami. Demikianlah pernyataan dan permohonan kami dan atas perhatian Bapak Gubernur, kami mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala usaha yang baik diberkati oleh Allah Yang Mahabaik.

Dikeluarkan di Jayapura, 15 April 2002

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM

Uskup Jayapura

Pdt. Herman Saud M.Th

Ketua Sinode GKI

Pdt. John Gobay S.Th

Ketua Sinode GKII

Tembusan:

1. Para pemimpin agama Papua
2. Ketua DPRD Provinsi Papua
3. Kapolda Papua
4. Panglima Kodam XVII/ Trikora
5. Presidium Dewan Papua
6. Kalangan LSM Papua

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA—INDONESIA

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-534993
E-Mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id

OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA

Jayapura, 25 April 2002

No. : 100/BD/02/3.4.17

DAFTAR ISI

- I. LATARBELAKANG
- II. LAPORAN KRONOLOGIS
 - A. Bagian I : 28 September – 8 Oktober
 - B. Bagian II : 9 Oktober – 15 Oktober
 - C. Bagian III : 16 Oktober – 18 November
- III. ANALISIS DAN KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. LAMPIRAN
 - 1. Daftar Korban
 - 2. Kerugian Materiil
 - 3. Denah Lokasi
 - 4. Foto-foto

I. LATARBELAKANG

Konteks geografis

Ilaga merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua, yang berjarak 440 km dari Jayapura (ibukota Propinsi Papua) dan merupakan sebuah lembah yang berada di ketinggian 7.000 kaki dpl. Penduduk asli daerah ini merupakan campuran antara Suku Lani dengan Suku Damal/ Amungme¹. Jalur transportasi ke lembah tersebut hanya dapat ditempuh melalui jalur udara dengan pesawat-pesawat tipe Cessna, Pilatus, atau Twin Otter. Hubungan telekomunikasi dengan wilayah lain di Papua hanya dapat dilakukan dengan radio SSB. Dengan demikian wilayah ini relatif terisolir.

Konteks sosio-politis

Wilayah Ilaga dan sekitarnya lazim dikenal sebagai wilayah bergolak dimana gerakan perlawanan rakyat Papua berbentuk TPN/OPM hadir dengan sangat jelas dan terbuka. Pemimpin gerakan itu, Titus Murib, pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan guna mengungkapkan aspirasinya, antara lain terlibat dalam kasus “penyanderaan Mapnduma”² tahun 1996 dan perampasan senjata TNI atau Polri di satu dua tempat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Selama tahun 2001 Ilaga kembali menyita perhatian banyak orang, termasuk dunia internasional, dengan terjadinya aksi penyanderaan di wilayah itu. Pada tanggal 7 Juni 2001 dua warganegara Belgia yang sedang berwisata di wilayah Ilaga ditahan oleh masyarakat setempat dan dijadikan sandera. Awal peristiwa ini sebenarnya sederhana saja, yakni muncul kecurigaan masyarakat terhadap kedua wisatawan asing itu karena mereka mengambil gambar dan membuat film di tempat-tempat yang dilaluinya. Muncul kecurigaan bahwa hasil dokumentasi mereka akan diserahkan kepada aparat keamanan. Karena kecurigaan itulah hasil dokumentasi itu menjadi sasaran utama sewaktu mereka disergap pada tgl. 7 Juni 2001. Salah satu pelaku penyerapan itu lari dengan seluruh hasil dokumentasi foto dan film; sedangkan kedua wisatawan asing itu tidak diapa-

¹ Meski dua nama itu dipakai untuk satu suku yang memakai bahasa Amungkal atau Damalkal, nama ‘Amungme’ sendiri kurang dipakai di Ilaga melainkan lebih dipakai di daerah selatan: sekitar Timika-Akimuga. Di Ilaga, suku yang sama biasa menyebut dirinya Damal.

² Penyanderaan itu menimpa Tim Peneliti WWF yang disebut Tim Lorentz. Penyanderaan itu berlangsung 8 Januari 1996 hingga 13 Mei 1996. Setelah negosiasi gagal, pemerintah melancarkan operasi militer yang dipimpin oleh Danjen Kopassus, May. Jend. Prabowo Subianto, untuk membebaskan sandera. Meski sandera telah dibebaskan, TNI masih melancarkan operasi militer pasca penyanderaan yang mengorbankan penduduk sipil. Selengkapnya bisa dilihat dalam laporan ELS-HAM Irian Jaya, “Operasi Militer Pembebasan Sandera dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pegunungan Tengah Irian Jaya: Menyingkap misteri misi berdarah ICRC, keterlibatan tentara asing dan tentara nasional Indonesia”, Jayapura: Agustus 1999.

apakan. Barulah sewaktu mereka melanjutkan perjalanan, di tengah jalan mereka ditahan dan dijadikan sandera di Desa Paluga yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kecamatan Ilaga.

Selama dua bulan lebih (Juni – Agustus) diadakan perundingan yang alot dan menegangkan guna membebaskan kedua sandera itu. Perundingan diadakan antara dua utusan gereja yang dituntut oleh sandera, yakni Pdt. Benny Giay dan Br. Theo van den Broek ofm, dalam koordinasi dengan Kedutaan Besar Belgia dan Kapolda Irja, Irjen. Pol. Made Mangku Pastika, dengan pihak penyandera yang dipimpin oleh Titus Murib. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan untuk membebaskan dua wisatawan asing itu; sedangkan pelaku-pelaku penyanderaan tidak akan dikenai sanksi hukum oleh pihak Polda Irja. Jaminan dari kepolisian ini diperoleh secara resmi dan tertulis dari Kapolda Irja³. Disepakati juga bahwa aspirasi masyarakat Ilaga akan disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan kepada sejumlah lembaga internasional baik melalui tulisan maupun film. Dengan adanya kesepakatan ini wilayah Ilaga kembali tenang. Dalam suasana relatif tenang itulah muncul sekelompok orang berniat untuk merampas senjata milik satuan TNI yang bertugas di Ilaga.

Perampasan senjata di Ilaga 28 September 2001 ini merupakan sebuah pengulangan dari sejumlah peristiwa serupa yang telah terjadi sebelumnya di Ilu, Sinak, Mulia, Ilaga. Perampasan ini merupakan pola bertindak yang dilakukan oleh kelompok TPN/OPM yang dipimpin oleh Yustinus Murib⁴ dan Julius Telenggen. Kedua orang ini berasal dari Desa Kuyawage, Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya (yang biasa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 4 hari dari Ilaga).

Pada awalnya mereka mencoba mengajak Titus Murib⁵, pimpinan OPM di Ilaga, untuk bersama-sama merampas senjata. Akan tetapi, permintaan ini ditolak dengan tegas sehingga kelompok Yustinus meninggalkan wilayah Ilaga menuju ke Grassberg. Sesampainya di wilayah tersebut, kehadiran mereka juga tidak diterima karena tidak ada surat pengantar dari Titus Murib sehingga kelompok Yustinus kembali lagi ke Ilaga. Mereka berhasil mempengaruhi sekelompok pemuda di Ilaga untuk merampas senjata dan terjadilah rangkaian peristiwa kekerasan tersebut.

³ Surat Pernyataan Kapolda Irja, Irjen. Pol. Drs. Made M. Pastika, tgl. 2 Agustus 2001.

⁴ Yustinus Murib berumur sekitar 30 tahun, warga jemaat GKII, berasal dari Desa Kuyawage, memiliki 3 isteri dan 4 orang anak.

⁵ Titus Murib adalah pimpinan OPM di Ilaga, berasal dari Desa Pinapa, warga jemaat GKII. Titus Murib merupakan pemegang komando di Ilaga dan sekitarnya sehingga Yustinus Murib tidak dapat melakukan apapun tanpa izin dari Titus.

Dalam laporan ini kami akan menjabarkan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa kekerasan 28 September 2001.

II. KRONOLOGI KEJADIAN

A. BAGIAN PERTAMA

Jumat, 28 September 2001

Hari Jumat adalah hari pasar bagi warga masyarakat Ilaga sehingga banyak orang berada di pasar yang terletak di Desa Kago, pusat kecamatan Ilaga. Sekitar pk. 12.30 seorang pemuda bernama Peninggen Murib tiba-tiba menghadang dan memukul Kopda Harun, anggota Koramil Ilaga, dengan kayu pagar ke bagian lengan kanannya hingga patah dan korban terjatuh. Kopda Harun sedang berada dalam perjalanan dari Polsek Ilaga setelah pulang sholat Jumat di mesjid. Saat Kopda Harun terjatuh, Peninggen Murib merampas senjata Kopda Harun dan melarikan diri. Kopda Harun langsung berteriak meminta pertolongan. Tak jauh dari tempat kejadian, Tanggome Murib (laki-laki, 30 th)⁶, penduduk Desa Kimak, mengetahui tindakan tersebut dan melempar batu dan mengenai sasarannya: Peninggen Murib. Peninggen melepaskan senjata api yang dirampasnya dan terus melarikan diri. Senjata tersebut diambil oleh temannya Inikiapit Murib⁷. Saat Inikiapit Murib melarikan senjata tersebut, anggota Polsek dan Koramil sudah melakukan pengejaran. Mereka mengeluarkan tembakan dan tembakan Serda Pol. Amir mengenai paha kanan Inikiapit tetapi yang bersangkutan tetap lari menuju ke bekas lapangan terbang Kago. Tetapi pelarian ini tidak lama setelah akhirnya anggota polisi dan koramil berhasil menangkapnya.

Inikiapit Murib dibawa ke bekas lapangan terbang Kago dan di situ dia ditembak mati di bagian dada oleh Letda Dahlan, Komandan timsus Yonif 753 Paniai di Ilaga. Menurut para saksi, menjelang saat menghembuskan nafas terakhir, dia mengatakan berkali-kali (dalam bahasa Lani), "Saya orang Kuyawage, saya orang Kuyawage". Jenazahnya kemudian dipikul oleh anggota Polsek ke Polsek

⁶ Tanggome Murib adalah kepala suku Ilaga yang diangkat oleh Pemerintah, berasal dari Desa Kimak, tidak berpendidikan formal, warga jemaat GKII, memiliki 4 istri dan 5 orang anak dari isteri pertama dan kedua.

⁷ Inikiapit Murib adalah warga masyarakat biasa, berasal dari Desa Pinapa, tidak berpendidikan formal, warga jemaat GKII, mempunyai 2 istri dan 3 orang anak, masih berhubungan saudara dengan Titus Murib, pimpinan TPN/OPM di Ilaga.

Ilaga yang berjarak kurang lebih 100 m dari tempat penembakan pada pk. 15.30. Danton Timsus Yonif 753, Letda Dahlan, kemudian mendatangi Camat di kantor kecamatan dan dengan amat tegas mengatakan, “Kau bisa bertanggung jawab untuk jaga keamanan tidak?!”. Camat menjawab, “Bisa, siap”. Selanjutnya diadakan perundingan antara Tripika. Berdasarkan hasil perundingan tersebut jenazah dikuburkan di kuburan Kago yang berjarak lebih kurang 200 m dari Polsek Ilaga sekitar pk. 16.00.

Sekitar dua jam kemudian, Pdt. Kaleb Murib (anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya) bersama dengan Markus Kogoya, aparat Desa Pinapa, datang menghadap Camat Ilaga, Freddy Rumbekwan, meminta jenazah Inikiapit Murib atas nama keluarga korban guna menghindari konflik berkepanjangan. Setelah diadakan perundingan, Camat mengizinkan permintaan tersebut sehingga mereka menggali kembali kuburan Inikiapit di kuburan Kago dan menguburkannya di Desa Eromaga (sekitar 4 KM dari pusat kecamatan) meskipun dia sebenarnya berasal dari Desa Pinapa.

Malam hari, kelompok TPN/OPM bersama masyarakat Desa Jenggernok (7 KM dari pusat kecamatan) dan Desa Mundidok (5 KM dari pusat kecamatan) mulai berkumpul di SD Inpres Kago dengan bersenjata busur dan anak panah serta siap bergerak ke pusat kecamatan yang tinggal berjarak sekitar 1,5 km. Sekitar pk. 21.00 terdengar tembakan di depan koramil dan ternyata Serka Maskur Adam, anggota Koramil, ditembak lengan kirinya oleh kelompok TPN/OPM saat berlari menuju koramil. Gabungan TPN/OPM dan masyarakat desa telah mengepung pusat kecamatan. Selain itu mereka juga telah memasang palang di lapangan terbang MAF⁸, Desa Amenggaru.

Sementara itu di Desa Gome (sekitar 8 km dari pusat kecamatan), tempat pasturan katolik berada, umat menjaga pasturan dan radio SSB yang dikabarkan hendak dirampas oleh kelompok Satgas Papua pimpinan Anton Tabuni.

Sabtu, 29 September 2001

Sekitar pk. 12.00 gabungan antara TPN/OPM yang sudah mengepung lokasi kecamatan mulai membakar dengan bensin dan minyak tanah : Polsek Ilaga (4 unit), mesjid (1 unit), kios-kios pasar (belasan unit), kantor BPD (1 unit), kantor pos dan giro (1 unit). Akibat dari serangan ini semua penduduk yang tinggal di kecamatan lari mengungsi ke rumah Camat yang berjarak sekitar 50 m dari

⁸ Di lembah Ilaga terdapat dua lapangan terbang yang terpisah sekitar 11 km: lapangan terbang milik MAF (*Missionary Aviation Fellowship*) dari Gereja-gereja Protestan yang berada di Desa Amenggaru dan lapangan terbang milik AMA (*Associated Mission Aviation*) dari Gereja Katolik di Desa Gome.

pasar. Sebagian penduduk lain mengungsi ke desa-desa lain yang dirasa aman atau masuk hutan.

Sore harinya, sejumlah warga desa di antaranya Martinus Wakerkwa⁹, Kepala Desa Wuloni, menemui Titus Murib di Desa Eromaga. Pada intinya warga desa meminta bantuan Titus untuk mendamaikan situasi di Kago yang telah berubah menjadi medan perang. Setelah dilakukan perundingan, Titus menyetujui permintaan tersebut dan menulis surat kepada Tripika yang dibawa oleh Kepala Desa Wuloni.

Minggu, 30 September 2001

Serangan gabungan berlanjut dengan membakar sebagian rumah sakit (2 unit), rumah-rumah pegawai kecamatan (4 unit), perumahan pegawai puskesmas (5 unit), honai percontohan (2 unit). Pdt. Kaleb Murib datang menghadap Camat dengan membawa surat dari Titus Murib yang pada intinya menyatakan: [1] supaya pos pasukan Tribuana di Amenggaru dipindahkan ke Kago, pusat kecamatan, [2] supaya tindakan pengejaran terhadap masyarakat dihentikan, [3] tidak menghendaki peperangan.

Senin, 1 Oktober 2001

Pagi-pagi, Martinus Wakerkwa, Kepala Desa Wuloni, mengedarkan surat dari Titus Murib kepada Danramil, Komandan Yonif 753 di Ilaga, dan kelompok TPN/OPM.

Sekitar pk. 13.00 muncul dua helikopter milik TNI. Satu heli turun di dekat pos Yonif 753 di Desa Kago dengan menurunkan sekitar 10 orang anggota TNI Yonif 753 dari Hoesa yang dipimpin oleh Letda Budi. Kedatangan ini disertai tembak menembak dengan TPN/OPM dari kejauhan. Satu heli mengangkut Satuan Kopassus Tribuana sekitar 15 orang yang kemudian menduduki lapangan terbang MAF di Desa Amenggaru yang sebelumnya telah dipalang oleh TPN/OPM. Sebagai reaksi atas penerjunan pasukan tersebut, massa membakar sebagian gedung SMP dan sisa honai pegawai yang masih ada di Desa Kago.

Selasa, 2 Oktober 2001

Sekitar pk. 9.00 muncul satu helikopter milik TNI yang mendarat di lapangan MAF, Desa Amenggaru. Dalam pendaratan ini datang Satuan Brimobda sekitar 25 orang. Satuan Brimobda langsung turun ke pusat kecamatan untuk menjaga rumah Camat.

⁹ Martinus Wakerkwa adalah Kepala Desa Wuloni, laki-laki, berumur sekitar 40 tahun, beragama Katolik, memiliki 1 isteri dan 4 orang anak.

Sekitar pk. 10.00 Lelome Kogoya (laki-laki, 40 th)¹⁰ dengan memanggul busur anah panah berjalan pulang ke kampung Nipuralome yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kecamatan. Tiba-tiba dia terkena tembakan dari belakang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri. Dia segera terjatuh dan dilarikan oleh penduduk desa ke seberang kali. Di rumah kegiatan kelompok Tani, dia 'dioperasi' secara tradisional oleh masyarakat guna mengeluarkan peluru yang bersarang di paha kirinya. Sesudahnya dia dirawat di situ selama tiga hari.

Jumat, 5 Oktober 2001

Pagi-pagi, masyarakat dari sekitar Desa Gome, Desa Upaga, berinisiatif pergi ke pusat kecamatan untuk mengadakan perdamaian dan menghentikan pertikaian. Sekitar 40 orang laki-laki dan perempuan bergabung bersama. Mereka membawa dua potong kertas yang bertuliskan "Masyarakat Minta Damai". Kelompok ibu-ibu membawa sayur dan ubi-ubi dalam noken. Rombongan tersebut berjalan ke Kago. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan Pdt. Kaleb Murib dan ketua Klasis GKII Ilaga, Pdt. Martinus Magay (laki-laki, 45 th)¹¹. Saat kedua rombongan bertemu, mereka semua menangis sedih karena kejadian yang menimpa mereka. Selanjutnya, mereka berjalan bersama ke kecamatan.

Sesampai di kecamatan rombongan masyarakat duduk di halaman kantor Camat, sementara kedua pendeta menemui camat. Pada saat bersamaan, anggota TNI menemui masyarakat dan menyatakan menolak upaya damai. Salah seorang pegawai kecamatan Ilaga, Kornelis Tabuni, malah memarahi masyarakat dan mengusir mereka pulang tetapi memerintahkan agar sayuran dan ubi-ubi ditinggalkan. Akhirnya, masyarakat pulang ke Gome.

Sore harinya, umat katolik di Desa Gome mulai membersihkan palang-palang di lapangan terbang AMA (lihat foto lapangan) yang dipasang oleh kelompok Satgas Papua yang dipimpin Anton Tabuni¹².

¹⁰ Lelome Kogoya adalah petani desa biasa, berasal dari kampung Nipuralome, Desa Kago, anggota jemaat gereja GKII, memiliki 1 isteri (Aquilina Wonda) dan 4 orang anak.

¹¹ Ketua Klasis GKII (Gereja Kemah Injil di Irian Jaya) Ilaga merupakan pemimpin gereja yang membawahi satu wilayah besar yang terdiri dari 37 gereja di seluruh Ilaga dengan jumlah umat sekitar 13.300 orang (tahun 2001).

¹² Anton Tabuni adalah pemimpin Satgas Papua di Ilaga, sebelumnya adalah guru SD Inpres Tuanggi, pernah menjadi anggota Tim 100 yang bertemu dengan Presiden BJ. Habibie di Istana Negara, 26 Februari 1999.

Sabtu, 6 Oktober 2001

Pagi-pagi, Anton Tabuni mendatangi Pastoran Katolik Ilaga dan memarahi umat yang telah mencabut palang-palang di lapangan terbang AMA serta memerintahkan agar palang dipasang lagi. Umat menolak sehingga dia mengancam, "Kalau ABRI sampai mendarat di Gome, nyawa kalian ada di tangan kami". Anton kemudian mencabut bendera Merah Putih yang dikibarkan sebagai tanda damai oleh *paitua-paitua* di lapangan volley. Sesudahnya, dia bersama kelompok Satgas Papua memasang palang di lapangan AMA.

Sementara itu, usaha perdamaian dari masyarakat kembali dilakukan. Perwakilan masyarakat kembali mendatangi Camat di kantornya. Kali ini, masyarakat bertemu dengan Camat, Kapolsek, Danramil, Komandan Kopassus, Danton Yonif 753, dan Danton Yonif 753 bantuan. Dalam pertemuan itu, Danton mengawali pembicaraan dengan pengarahannya, "Masyarakat tidak boleh ikut-ikutan melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti merebut senjata sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri menjadi korban. Angkat perang juga tidak boleh". Hal senada disampaikan oleh anggota Tripika lainnya. Masyarakat menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka mau damai saja dan perlu diadakan bakar batu sebagai tanda damai. "Pemuda-pemuda bisa lari tetapi kami, tua-tua ini, mau lari kemana". Perundingan rupanya berjalan cukup alot karena pemerintah cenderung tidak mau berdamai. Karena itu, Lele Waker, salah satu kepala suku, berkomentar, "Kelihatan pemerintah tidak mau berdamai. Mengapa kita mau bakar batu. Lebih baik masak ubi dan sayur saja." Tetapi masyarakat desa yang lain tidak sependapat dengan dia.

Pada akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengadakan upacara bakar batu sebagai tanda perdamaian yang akan dilaksanakan tgl. 8 Oktober 2001 di Kago. Saat masyarakat desa mulai bubar, polisi mengungkapkan kecurigaannya, "Kaleb, itu kasih bensin sama masyarakat dan TPN/OPM untuk melakukan pembumihangusan kecamatan. Dia juga putarbalikkan fakta. Dialah yang membantu Titus karena sama-sama tinggal di Eromaga". Karenanya salah seorang anggota polisi segera mengejar untuk menembak Pdt. Kaleb Murib yang sudah berada di jalan masuk ke kecamatan. Secepat kilat dia berlari ke arah Desa Eromaga dan menghilang dari Ilaga sejak hari itu.

Sore harinya, Lelome Kogoya dipindahkan ke rumah familinya di Desa Kimak. Sejak saat ini Lelome terpaksa berjalan dengan dua tongkat penyangga (lihat

foto). Pada kesempatan itu, Das Kogoya (laki-laki, 38 th)¹³, adiknya, ikut menghantar kakaknya. Sekembalinya dari Desa Kimak, Das mengatakan akan pulang ke rumahnya di Desa Amenggaru dan sejak itu, keluarganya tidak dapat menemukannya sehingga dinyatakan hilang.

Senin, 8 Oktober 2001

Diadakan upacara bakar batu sebagai tanda perdamaian. Bakar batu ini dilaksanakan di halaman perumahan guru SD Inpres Kago (sekitar 2 km dari pusat kecamatan). Dalam upacara tersebut dipotong sekitar 50 ekor babi¹⁴ yang diusahakan oleh masyarakat dari 4 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut adalah Desa Eromaga sampai dengan Desa Pinapa (kepala air), Desa Gome dan sekitarnya, Desa Kago sampai Kampung Tagaloak, dan Desa Dogi sampai dengan Desa Ogomenani.

Sebelum makan diadakan pengarahan dari Camat, Danramil, Danton Yonif 753, Danton Brimobda, dan Komandan Kopassus Tribuana. Semuanya mengatakan hal yang senada: supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh ajakan TPN/OPM. Camat Ilaga mengatakan bahwa daerah Ilaga sekarang adalah daerah damai. Komandan Kopassus mengajak masyarakat untuk kembali berjualan di pasar pada hari biasa (Selasa).

Sementara acara bakar batu berlangsung, pasukan TNI mulai menjarah ternak dan membakar *honai-honai*¹⁵ masyarakat, yakni milik Mililuk Kogoya, Pieter Wakerkwa dan Willem Kogoya di Kampung Kibolome, Desa Kago. TNI juga merampas ternak ayam dan kelinci milik Janonu Wakerkwa (Kepala Desa Wako, kebetulan sedang berada di Mulia) yang tinggal di Kampung Jilame, Desa Kago (dekat jembatan kali Jila). Akibat perampasan ini, isteri Janonu marah besar tetapi tidak dapat berbuat apa-apa.

B. BAGIAN KEDUA

Selasa, 9 Oktober 2001

Hilangnya Das Kogoya telah dilaporkan kepada ketua Klasis GKII, Pdt. Martinus Magay, oleh pihak keluarga. Karena itu bersama dengan sekitar 8 orang pemuda, Ketua Klasis mencari ke kantor Camat. Di sana rombongan bertemu

¹³ Das Kogoya adalah petani desa, pendidikan SD YPPGI Eromaga, berasal dari Kampung Nipuralome, tinggal di Desa Amenggaru, anggota jemaat gereja GKII, memiliki 1 isteri (Abelemonge Wonda) dan 2 anak, sering mengikuti acara-acara TPN/OPM.

¹⁴ Babi bagi masyarakat Ilaga selain memiliki nilai budaya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harga satu ekor babi dewasa di Ilaga tahun 2001 sekitar Rp. 4-5 juta.

¹⁵ *Honai* adalah rumah tradisional masyarakat Suku Lani yang berbentuk lingkaran dengan atap setengah bola yang terbuat dari daun-daun alang-alang.

dengan polisi. Dalam pembicaraan tersebut polisi menanyakan keberadaan pendeta saat penyerangan pertama terjadi. Pendeta menjelaskan bahwa pihaknya saat itu sedang rapat intern GKII di Timika dan baru sesudahnya coba kembali ke Ilaga melalui Beoga. Keterangan ini tidak dipercaya oleh polisi dan pendeta dituduh memutarbalikkan fakta. Alih-alih mendapatkan keterangan mengenai Das Kogoya, ketua klasis malah mendapatkan pukulan dengan popor senjata di kepala belakang bagian kiri hingga berdarah (lihat foto). Karena tidak memperoleh keterangan apapun, rombongan tersebut pulang.

Sore harinya, rombongan pendeta mencoba mencari keterangan di Pos Kopassus di Desa Amenggaru. Pihak Kopassus lalu menyodorkan daftar nama¹⁶ yang ditemukan mereka di lokasi rumah sehat yang dibangun oleh PT. Freeport di Desa Amenggaru. Dalam daftar tersebut, Pdt. Martinus Magay melihat nama Das Kogoya ada di dalamnya. Sesudahnya tiba-tiba Pdt. Martinus ditampar dan disuruh pulang. Karena merasa tidak aman, Pdt. Martinus dan rombongannya pulang tetapi tidak kembali ke rumah klasis melainkan kembali ke Desa Kunga, tempat asal ketua klasis.

10-13 Oktober 2001

Mulai dilakukan evakuasi pengungsi dari Ilaga ke Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya (berjarak sekitar 58 km) sebanyak 109 orang yang terdiri dari pedagang, pegawai, guru-guru, mantri. Pengungsian dilakukan dengan menggunakan pesawat Trigana.

Sementara itu penduduk desa di sekitar pusat kecamatan yang mengungsi mengalami sakit dan meninggal di perjalanan:

No.	Nama	Desa	Umur (tahun)	Jenis kelamin	Waktu kematian
1.	Yunianus Kogoya	Pinapa	6	Lk	29 September 2001
2.	Etin Waker	Eromaga	7	Lk	29 September 2001
3.	Kelenaronuge Kogoya	Nggelini	37	Prp	4 Oktober 2001
4.	Kenolek Murib	Nggelini	36	Lk	18 Oktober 2001
5.	Ino Tabuni	Pinapa	40	Lk	17 Oktober 2001
6.	Noramban Murib	Pinggir	50	Prp	11 Oktober 2001
7.	Meriana Wanimbo	Nggelini	5	Prp	10 Oktober 2001

¹⁶ Kopassus menjaga lapangan dan saat beroperasi sekeliling perumahan yang dibangun oleh PT Freeport, mereka menemukan daftar nama yang ditinggalkan kelompok TPN/OPM saat meninggalkan salah satu rumah tersebut. Daftar nama tersebut merupakan daftar para penyumbang terhadap kelompok TPN/OPM.

8.	Wendakalorinka Kogoya	Pinggir	40	Lk	5 Oktober 2001
9.	Koroli Murib	Nggelini	46	Lk	8 Oktober 2001

11 Oktober 2001

Satuan Yonif 753 Paniai (bantuan) yang dipimpin oleh Letda Budi mulai melakukan operasi pembumihangusan honai-honai mulai dari Desa Kago, Eromaga, Nggelini, dan Amenggaru. Operasi ini dilakukan bersama dengan sejumlah penduduk Desa Kimak yang diperintahkan untuk menjadi penunjuk jalan bagi militer.

Pasukan operasinya ke pusat GKII di Desa Eromaga mulai dari bekas rumah Pdt. Larson (lihat foto). Barang-barang yang tersimpan di koperasi seperti mie, garam, gula, dirampok oleh pasukan. Kaca-kaca rumah dipecahkan, kasur dan kursi-kursi disayat-sayat dengan sangkur, jendela dan pintu rumah dibobol. Gudang dan isinya dihamburkan keluar. Sasaran berikutnya adalah rumah agen MAF, Matias Murib, dibongkar. Barang-barang yang ada diambil. Panel *solar-cell* dan aki untuk radio SSB dirusak. Berikutnya adalah kantor Klasis GKII: pintu-pintu dan jendela dirusak, barang-barang kantor diporak-porandakan. Akhirnya, sasaran terarah ke perumahan guru sekolah Alkitab (STP/STA)¹⁷ yang digeledah. Koperasi sekolah dibongkar dan isinya dijarah. Sesudahnya, pasukan membakar habis sekitar 35 honai siswa sekolah alkitab, rumah-rumah guru STP/STA, rumah agen AMA, gudang klasis, gudang bahan bakar, rumah diesel, 144 honai selain honai siswa di lokasi tersebut hangus dibakar. Di Kampung Eronggobak, Desa Nggelini, puluhan honai masyarakat dan perumahan guru sebanyak 3 unit dibakar hangus tanpa sisa sedangkan SD Inpres Eronggobak dirusak.

Sekitar pk. 01.00 (dini hari), pasukan Yonif 753 (bantuan) yang dipimpin oleh Letda Budi melanjutkan operasi di Kampung Ondugura, Desa Pinapa (sekitar 10 km dari pusat kecamatan). Pasukan menggeledah rumah-rumah penduduk. Rumah pertama yang menjadi sasaran adalah milik Mesakh Kogoya. Pasukan menggeledah isi rumah, mengambil sebuah mesin ketik dan barang-barang yang ada dalam rumah. Berikutnya adalah rumah-rumah guru SD Inpres Ondugura digeledah dan perabot rumah tangga dihamburkan keluar rumah. SD Inpres juga dirusak.

¹⁷ STP : Sekolah Teologi Pertama, STA : Sekolah Teologi Atas.

Pasukan Yonif 753 mengeledah satu honai laki-laki. Penghuninya dipaksa keluar, dipukuli dengan popor senjata, dan dilukai dengan sangkur. Warga kampung yang sedang tidur di 4 honai laki-laki disuruh keluar. Mereka diperintahkan untuk merangkak keluar honai tersebut dan kemudian berbaring menghadap ke atas. Warga kampung kemudian disayat dengan sangkur pada dahi masing-masing dengan bentuk huruf X. Pasukan masih mengeledah 4 honai perempuan. Kaum perempuan disuruh keluar juga dari loteng tempat tidur dalam keadaan telanjang. Pasukan kemudian mengeledah honai lalu pergi setelah tidak mendapatkan barang-barang yang berharga.

15 Oktober 2001

Satuan Brimoda berangkat ke Mulia dengan pesawat Trigana. Sementara satuan Kopassus kembali ke Timika. Dengan demikian yang tinggal di Ilaga adalah Koramil, Polsek, dan Satuan Yonif 753 Paniai.

16 Oktober 2001

Siang hari, rombongan Wakil Bupati Puncak Jaya, Drs. Lukas Enumbi, dan sejumlah anggota DPRD Puncak Jaya tiba di Ilaga dari Mulia dengan pesawat Trigana. Rombongan pemda dan DPRD tersebut membawa bahan makanan yang dibagikan kepada warga masyarakat di sekitar Desa Kago. Selain itu diadakan bakar batu untuk kedua kalinya. Kali ini bertempat di lapangan bola kecamatan (sekitar 200 m dari kantor camat). Dalam kesempatan bakar batu, Wakil Bupati mengadakan dialog dengan masyarakat yang berkumpul di situ. Masyarakat sampaikan, "Kita sudah bakar batu pertama tetapi pasukan masih tembak babi, bakar honai, curi-curi kelinci, ayam. Ini bagaimana". Wakil Bupati mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat mengenai pembakaran honai-honai yang dilakukan oleh militer. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati, berjanji akan melarang dengan tegas pembakaran yang dilakukan oleh tentara. Selesai acara bakar batu, rombongan masih tinggal di Ilaga hingga tgl. 18 Oktober 2001.

C. BAGIAN KETIGA

23-24 Oktober 2001

Bupati Puncak Jaya, Drs. Elieser Renmaur, beserta Muspida Puncak Jaya berkunjung ke Ilaga¹⁸. Dalam kesempatan ini diadakan lagi upacara bakar batu sebagai tanda perdamaian. Bupati mengadakan dialog dengan masyarakat dan menegaskan sejumlah hal : [1] pembakaran honai harus dihentikan oleh pihak militer, [2] tempat-tempat yang sudah dibakar akan dibangun kembali, [3]

¹⁸ Lihat Laporan Bupati Puncak Jaya kepada Gubernur Irja No. 351/136/SET tertanggal 26 Nopember 2001.

kejadian tersebut bukanlah perang antara masyarakat Papua dengan pemerintah melainkan soal pencurian senjata, [4] masyarakat yang sementara mengungsi ke Mulia atau tempat-tempat lain akan dikembalikan ke tempat asalnya di Ilaga, [5] Desa Gome akan dimekarkan sebagai kecamatan sebagai yang pertama di antara desa-desa lainnya.

Minggu, 18 November 2001

Pagi sekitar pk. 8.00 di lapangan terbang Mulia, polisi dari Ilaga yang kenal baik menangkap Aikia Tabuni, anggota Satgas Papua, (laki-laki, 29 tahun)¹⁹ yang sudah berada di dalam pesawat Merpati karena hendak berangkat ke Nabire. Aikia ditangkap dan dibawa ke Polsek Mulia dengan tuduhan bahwa dia termasuk daftar orang yang dicari oleh polisi karena menjadi salah satu penggerak kerusuhan massa 28 September 2001 di Ilaga.

Di Polsek Mulia, dia diinterogasi sambil diborgol dan dipukuli di sekujur badannya. Kemudian dia ditahan di Polsek. Aikia berusaha melarikan diri setelah meloloskan diri dari borgol di kaki dan tangannya. Dia berlari di tengah kerumunan massa dan di semak-semak di ditembak dari belakang oleh polisi yang mengejarnya, Baransano. Mula-mula tembakan diarahkan ke kaki tetapi Aikia berlari terus sehingga ditembak di bagian pantat dan pinggang. Dia dapat dilumpuhkan dan dibawa kembali ke Polsek Mulia dan dirawat oleh mantri Puskesmas Mulia, Demus Wonda (laki-laki, 30 th). Kejadian ini dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati dan Ketua DPRD tetapi tidak ada uluran tangan dari kedua pejabat tersebut. Karena itu Ruben Tabuni, kepala suku (laki-laki, 56 tahun)²⁰, turun tangan mengurus perkara tersebut.

Senin, 19 November 2001

Ruben Tabuni menghantar Aikia ke Nabire dengan menumpang pesawat Trigana atas biaya Bupati Puncak Jaya. Sesampai di Nabire, mereka melapor ke Polres Paniai di Nabire dan dimintai keterangan sekitar 1 jam. Sesudahnya mereka pergi berobat ke RSUD Nabire di Kalisusu. Aikia langsung diperiksa oleh dokter.

Sekitar pk. 21.00 dilakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang dalam tubuh Aikia dan merobek usus.

¹⁹ Aikia Tabuni adalah pemuda yang berasal dari Desa Muididok, 27 tahun, anggota jemaat GKII, dan amat dekat bergaul dengan tentara dan polisi yang bertugas di Kecamatan Ilaga.

²⁰ Ruben Tabuni adalah kepala suku besar orang Ilaga, berasal dari Desa Jenggernok, tinggal di Desa Kalisusu-Nabire, anggota jemaat GKII, memiliki 1 isteri dan 4 orang anak.

Selasa, 20 November 2001

Malam hari, Aikia meninggal dunia akibat pendarahan yang diderita sebelumnya. Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah kediaman Ruben Tabuni untuk selanjutnya siap dikuburkan.

Rabu, 21 November 2001

Aikia Tabuni dikuburkan di Desa Kalisusu, Nabire.

III. ANALISIS DAN KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan peristiwa yang disusun di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur penting yang membentuk seluruh rangkaian peristiwa kekerasan tgl. 28 September 2001 berikut latarbelakang dan dampak yang ditimbulkannya.

1. Jenis kekerasan

Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut merupakan pola balas-membalas antara dua kelompok bersenjata, yakni massa dan TPN/OPM dengan TNI-Polri yang mengorbankan hidup masyarakat desa biasa. Kekerasan itu terdiri dari perampasan, pembunuhan kilat, perusakan dan pembakaran, penghilangan, penyiksaan, dan kekerasan terhadap perempuan.

a) Perampasan senjata yang dilakukan oleh pemuda.

Tindakan ini merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan dan yang memicu berkobarnya serangkaian tindak kekerasan yang tidak dapat dikendalikan lagi tetapi jelas memakan korban terbesar pada pihak kelompok penduduk desa. Tindak pidana ini pada dirinya tampak terbatas pada pelaku tetapi dampaknya ternyata meluas.

b) Pembunuhan di luar prosedur hukum (*extrajudicial execution*) terhadap Inikiapit Murib

Dalam menghadapi tindakan kriminal, TNI dan Polri yang bertugas di Ilaga telah menggunakan kekerasan secara berlebihan karena pelaku senyatanya sudah dilumpuhkan sehingga tidak ada alasan untuk ditembak mati melainkan justru harus diproses secara hukum pidana. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah anggota TNI justru menembak mati pelaku perampasan tanpa alasan hukum yang sah. Dengan tindakan ini, kembali TNI memperlihatkan arogansinya dengan menempatkan diri di atas

hukum hingga seakan-akan berwenang menjatuhkan hukuman mati di luar pengadilan apalagi terhadap penduduk sipil. Tindakan tersebut telah melanggar hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun (*non-derogable rights*), yakni hak hidup, seperti diatur dalam pasal 4 dan 18 ayat 1 UU no. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia**, pasal 28 I ayat 1 **Amandemen Kedua UUD 1945**, dan tidak mengindahkan **Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekeraan Dan Senjata Api Bagi Aparatur Penegak Hukum** no. 9.

c) Perusakan dan pembumihangusan tempat hunian, fasilitas umum, dan sosial yang dilakukan oleh massa dan TPN/OPM

Massa dan TPN/OPM telah mengorbankan penduduk sipil dengan melakukan pembumihangusan yang melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup terisolir seperti Ilaga. Kedua belah pihak yang bertikai telah melanggar hak atas kesejahteraan dan kepemilikan seperti yang diatur dalam pasal 36 ayat 2&3 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

d) Perusakan dan pembumihangusan fasilitas sosial dan pemukiman penduduk oleh TNI dan Polri

TNI dan Polri telah mengorbankan penduduk sipil dengan melakukan perusakan dan pembumihangusan sekolah dan pemukiman penduduk desa (*honai-honai*). Kedua belah pihak yang bertikai telah melanggar hak atas kesejahteraan dan kepemilikan seperti yang diatur dalam pasal 36 ayat 2&3 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

e) Penganiayaan yang dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap Lelome Kogoya

Dalam upaya mengatasi masalah keamanan di Ilaga, ternyata TNI dan Polri telah bertindak di luar kendali. Hal ini terbukti dari tertembaknya satu orang petani, Lelome Kogoya, yang tidak terlibat samasekali dengan bentrokan antara massa dengan TNI dan Polri dan berada relatif jauh dari pusat kecamatan Ilaga. Tindakan seperti itu membuktikan bahwa langkah yang diambil oleh TNI dan Polri belum berdasarkan pembedaan target yang jelas antara penduduk dengan pihak yang terlibat bentrokan. Dengan tindakan indiskriminatif ini, TNI dan Polri telah melanggar pasal 18 ayat 4 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia** dan pasal 28 I ayat 1 **Amandemen Kedua UUD 1945**

f) Penghilangan secara paksa (*enforced disappearance*) oleh TNI terhadap Das Kogoya

Satuan TNI yang bertugas di Ilaga telah bertindak hanya berdasarkan daftar nama yang diduga sebagai simpatisan atau pendukung gerakan OPM. Daftar nama tersebut seharusnya diselidiki dulu secara hukum sebelum dijadikan dasar pengejaran tersangka. Namun demikian, TNI menjelaskan hilangnya Das Kogoya dengan memperlihatkan daftar nama yang ditemukannya. Dengan demikian sulit dihindari kesimpulan bahwa TNI bertanggung jawab atas hilangnya Das Kogoya. Berdasarkan tindakan tersebut, TNI telah melanggar hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun (*non derogable rights*), yakni hak untuk hidup, hak untuk dihargai sebagai pribadi di hadapan hukum, yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia** dan pasal 28 I ayat 1 **Amandemen Kedua UUD 1945**.

g) Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*) terhadap Aikia Tabuni

Menurut keterangan saksi, jelas bahwa Aikia ditangkap atas dugaan sebagai salah satu pemimpin penyerangan. Namun demikian, polisi harus memiliki bukti cukup sebelum menangkap Aikia karena dia tidak tertangkap tangan. Polisi tidak dapat begitu saja menangkap dan menahan apalagi tanpa surat penangkapan dan penahanan. Tindakan polisi yang sedemikian telah melanggar prosedur hukum pidana yang seharusnya ditegakkan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum.

h) Penyiksaan²¹ (*torture*) yang dilakukan oleh TNI dan Polri baik terhadap penduduk Kampung Ondugura maupun terhadap Aikia Tabuni

Dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dilakukan oleh Satuan TNI Yonif 753 dan Polri ternyata tidak mencari pelaku atau mengumpulkan keterangan tetapi telah melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk desa. Di Kampung Ondugura, anggota TNI memaksa warga desa yang sedang tidur untuk keluar dari honai hanya atas dasar dugaan bahwa mereka simpatisan OPM. Hal yang serupa terjadi terhadap Aikia Tabuni yang diinterogasi polisi dengan disertai pemukulan di seluruh tubuhnya. Tindakan ini tidak berdasar samasekali baik ditinjau dari segi etis apalagi dari segi hukum. Mencari keterangan atau informasi tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan apalagi dengan kekerasan yang disengaja dalam tindakan manapun juga. Tindakan tersebut dikategorikan dalam

²¹ Tindak 'penyiksaan' yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Anti-Penyiksaan yang telah diratifikasi menjadi UU No. 5/1998.

tindak penyiksaan yang melanggar pasal 2 ayat 2 UU No.5/1998 tentang **Konvensi Anti-Penyiksaan** dan telah melanggar pasal 4 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia** dan pasal 28 I ayat 1 **Amandemen Kedua UUD 1945**.

i) Kekerasan terhadap perempuan²²

Dalam melakukan operasi pengejaran, Satuan TNI Yonif 753 terbukti telah secara semena-mena memaksa sekelompok perempuan di Kampung Ondugura untuk keluar dari honai dalam keadaan telanjang karena dituduh sebagai simpatisan OPM. Tuduhan yang tidak berdasar tersebut ternyata memang tidak terbukti karena mereka semua adalah penduduk desa biasa yang tidak ada hubungan apapun dengan peristiwa kekerasan yang terjadi dan dalam keadaan tidur. Tindakan Satuan Yonif 753 tersebut merupakan pelecehan serius terhadap kaum perempuan sehingga kelompok perempuan tersebut mengalami kekerasan berganda. Mereka mengalami tindak penyiksaan dan pelecehan secara seksual. Tindakan tersebut telah melanggar **Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan** yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan **Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 dan 2**.

2. Dampaknya

Sebagai akibat langsung dari rangkaian peristiwa kekerasan tersebut adalah lumpuhnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang meliputi:

a) Lumpuhnya pusat ekonomi baik karena semua kios, rumah penduduk dibakar maupun karena hubungan transportasi udara terhenti total. Akibat yang paling nyata dan berdampak panjang adalah lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat Ilaga. Lalu lintas barang dari Nabire atau Sentani ke Ilaga yang ditentukan oleh adanya pasar dan transportasi udara lumpuh selama lebih dari 3 bulan padahal sarana-sarana itulah yang menjadi sendi perekonomian masyarakat. Akibatnya harga-harga barang di Ilaga menggila baik karena jumlah barang sedikit maupun karena konsumennya terlalu banyak.

b) Lumpuhnya pusat pemerintahan kecamatan

²² Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah seperti didefinisikan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tgl. 20 Desember 1993, khususnya pasal 1 dan 2.

Pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan baik karena kantor dan rumah pegawai dibakar habis maupun karena pegawai-pegawai sudah pergi meninggalkan pusat kecamatan. Kelumpuhan pemerintahan ini kiranya akan menjadikan kecamatan Ilaga mengalami kemunduran serius dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Dampak ini menimpa langsung penduduk seluruh kecamatan Ilaga karena sebagian besar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat amat bergantung dari kegiatan pemerintahan.

c) Lumpuhnya pendidikan karena sejumlah sekolah dirusak

Dampak buruk lainnya yang berjangka panjang adalah perusakan sarana pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Perusakan ini telah mengakibatkan terhentinya proses belajar-mengajar di Ilaga yang sebelumnya telah berjalan agak tersendat-sendat. Dengan peristiwa kekerasan tersebut, hambatan terhadap proses pendidikan menjadi diperburuk karena guru-guru –yang jumlahnya terbatas— lari mengungsi begitu pula para murid. Jika pendidikan dasar yang mempersiapkan masa depan Ilaga terhenti, bagaimana nasib masyarakat Ilaga di kemudian hari?

d) Pengungsian ke berbagai wilayah

Dampak buruk yang tak terhindarkan dalam setiap peristiwa kekerasan adalah terjadinya pengungsian internal (*internally displaced people*). Pengungsian ini terjadi dari Ilaga ke kecamatan sekitarnya seperti Ilu, Sinak, Mulia, tetapi juga ke tempat-tempat yang jauh seperti Nabire. Pengungsian juga terjadi ke hutan belantara yang dinilai aman oleh masyarakat desa. Akibat pengungsian tersebut dilaporkan sekurang-kurangnya 9 orang meninggal akibat sakit yang diderita saat mengungsi²³. Pengungsian dengan pola sedemikian belum mampu ditangani oleh pemerintah atau lembaga-lembaga keagamaan karena belum ada sistem yang dikembangkan secara akurat untuk menangani keadaan darurat akibat konflik.

3. Manipulasi upacara 'Bakar Batu'

Bagi masyarakat Papua di bagian pegunungan, upacara bakar batu adalah ritual penting untuk menandai berakhirnya konflik antar keluarga atau antar suku. Upacara itu menjadi simbol perdamaian yang mengikat

²³ Jumlah pengungsi secara pasti sulit dicatat mengingat wilayah geografis dan penyebaran penduduk yang begitu luas dan sistem pendataan penduduk yang tidak terjamin.

bagi pihak-pihak yang bersengketa. Upacara bakar batu tersebut ternyata dilaksanakan tiga kali dalam peristiwa Ilaga : 8 Oktober, 18 Oktober, 24 Oktober. Saat upacara bakar batu pertama berlangsung, tentara ternyata membakar honai dan merampas ternak. Setelah upacara bakar batu kedua dan ketiga ternyata perdamaian belum diupayakan secara serius oleh Pemerintah beserta aparat sipil dan militer. Dengan demikian upacara bakar batu yang bermakna tinggi dalam tata sosial masyarakat pegunungan telah disalahgunakan oleh pemerintah dan militer. Pemerintah beserta aparat sipil dan militer samasekali tidak menghargai makna upacara bakar batu apalagi memegang teguh komitmen untuk tidak melanjutkan tindak kekerasan. Hal sedemikian bukanlah tanpa sengaja mengingat ada tiga kali upacara bakar batu dan pemerintah mampu mencegah terulangnya tindak kekerasan oleh pihak militer terhadap penduduk desa.

4. Cara penanganan perkara oleh Pemda Kabupaten Puncak Jaya

Hal yang tidak boleh diabaikan adalah pendekatan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemda Kabupaten Puncak Jaya menangani masalah Ilaga. Hal ini dapat diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut

- upaya damai pertama (5 Oktober 2001) yang dilakukan sekelompok warga desa ditolak dan mereka diusir pulang.
- upaya damai kedua (6 Oktober 2001) terpaksa diterima setelah melalui perundingan yang alot dan tegang.
- upaya damai ketiga (8 Oktober 2001) dengan upacara bakar batu justru dibarengi dengan tindak kekerasan yakni pembakaran honai dan pencurian ternak penduduk oleh militer di Desa Kago.
- upaya damai keempat (16-18 Oktober) dan kelima (23-24 Oktober) dengan adanya laporan dari masyarakat kepada Waki Bupati, Bupati, DPRD, Muspida, tentang tindak kekerasan dari TNI dan Polri yang tidak dilaporkan kepada Gubernur selaku kepala wilayah Propinsi Papua yang seharusnya mendapatkan semua informasi dan data yang sebenarnya. Bupati Puncak Jaya justru secara resmi melaporkan bahwa *“tidak ditemukan fakta tentang adanya kegiatan represif oleh aparat keamanan seperti pembakaran Honai penduduk, penjarahan ternak dan perkosaan. Adapun sejumlah Honai yang dibakar bukan milik penduduk tapi merupakan markas TPN/OPM”*.²⁴ Bagaimana mungkin Pemda tidak menemukan fakta padahal dalam dua kali kunjungan Muspida Kabupaten, masyarakat dengan amat jelas

²⁴ Lihat Surat Laporan Bupati Puncak Jaya kepada Gubernur Irja.

mengungkapkan kepedihan hati mereka karena honai-honai mereka dibakar dan barang-barangnya dirampas atau dirusak oleh TNI? Mengapa Pemda Kabupaten Puncak Jaya berubah-ubah pendirian saat menghadapi masyarakat langsung dan saat memberikan laporan kepada Gubernur? Bukankah sebagai penyelenggara negara, Pemda Kabupaten Puncak Jaya wajib mengungkapkan fakta agar masalah ditangani secara akurat dan masyarakat betul dilindungi dari kekerasan yang berkelanjutan?

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut di atas pemerintah beserta seluruh aparatnya (sipil dan militer) jelas-jelas menghindari penyelesaian masalah secara tuntas dan berakar pada budaya dan kehendak masyarakat Ilaga. Lebih jauh dari itu, Pemda Kabupaten Jayawijaya beserta aparatnya tidak hanya melanggar kewajiban pasal 71 UU No. 39/1999 tentang **Hak Asasi Manusia** untuk menghormati, melindungi, memajukan, hak asasi manusia setiap warganegaranya melainkan juga prinsip dasar penyelenggaraan negara sebagaimana dengan amat jelas diatur dalam **Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4**.

5. Ketidakpedulian DPRD Kabupaten Puncak Jaya

Senada dengan Pemda Kabupaten Puncak Jaya, DPRD Kabupaten Puncak Jaya tidak mengambil langkah-langkah agar kehidupan penduduk sipil yang tidak terlibat konflik dilindungi atau dipulihkan. Fakta-fakta tersebut adalah:

- tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan saat bakar batu kedua (18 Oktober 2001)
- tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan saat bakar batu ketiga (24 Oktober 2001)
- tidak mengambil tindakan apapun saat terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap Aikia Tabuni di Mulia (18 November 2001)

Dengan demikian DPRD Puncak Jaya telah membiarkan masyarakatnya mengalami penderitaan tanpa mengambil tindakan yang efektif untuk menghentikannya.

6. Sejumlah indikasi kunci

Selain unsur-unsur di atas, masih terdapat sejumlah hal mencurigakan berdasarkan rangkaian fakta yang disusun di atas. Sejumlah hal kunci tersebut menyangkut pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan:

kelompok kecil dari Kuyawage, kelompok TPN/OPM pimpinan Titus Murib, penduduk Ilaga, TNI dan Polri.

a) Kelompok kecil dari luar Ilaga : “Kelompok Kuyawage”

Hal penting untuk digarisbawahi adalah munculnya kelompok kecil dari luar Ilaga (Desa Kuyawage) yang datang untuk mengajak penduduk Ilaga dan TPN/OPM Ilaga untuk melakukan perampasan senjata. Kelompok kecil inilah yang berinisiatif untuk melakukan tindak kriminal. Patut dipertanyakan mengapa kelompok kecil tersebut tidak mau melakukannya sendiri padahal di tempat lain di wilayah Puncak Jaya, mereka telah melakukan perampasan senjata tanpa mengajak kelompok TPN/OPM Ilaga?

b) Penduduk Ilaga dan TPN/OPM Ilaga menolak kehadiran kelompok Kuyawage

Sebagai tanggapan atas bujukan kelompok Kuyawage tersebut, ternyata penduduk Ilaga dan TPN/OPM pimpinan Titus Murib menolak mereka dengan tegas, bahkan mengusir mereka. Penduduk dan TPN/OPM berpegang pada prinsip berjuang secara damai dan menunggu jawaban dari pemerintah pusat atas aspirasi kemerdekaan yang telah disampaikan saat penyanderaan dua warga Belgia.

c) Kelompok Kuyawage mencari dukungan dari Desa lain

Meski ditolak dan diusir oleh penduduk Ilaga, kelompok Kuyawage dengan gigih coba mencari dukungan dari Desa lain sekitar Ilaga. Setelah dukungan diperoleh, mereka kembali ke Ilaga dan mencoba melakukan perampasan senjata. Cukup mencurigakan bahwa ternyata kelompok Kuyawage bersikeras untuk melakukan perampasan senjata dengan memperalat penduduk desa setempat. Mengapa mereka seakan-akan harus melibatkan pihak setempat entah penduduk desa entah TPN/OPM dalam kegiatan mereka?

d) Kelompok Kuyawage menghilang

Amat mengherankan bahwa setelah perampasan senjata gagal, jatuh korban, yakni Inikiapit Murib, dan pecah kekerasan di pusat kecamatan, seluruh kelompok Kuyawage ternyata menghilang dari Ilaga dan tidak terlibat lagi dalam bentrokan melawan TNI dan Polri. Tindakan ini amat mengherankan sekaligus menimbulkan tanda tanya besar: mengapa kelompok yang pada awalnya begitu bersemangat untuk mengobarkan kekerasan justru menghilang saat kekerasan sungguh-sungguh berkobar

dan menelan korban? Apakah kelompok Kuyawage semata-mata merupakan unsur pancingan terhadap masyarakat agar terlibat dalam bentrokan melawan TNI dan Polri?

e) TNI dan Polri tidak mengejar kelompok Kuyawage

Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa TNI dan Polri tidak mengejar kelompok Kuyawage ini yang sebenarnya bertanggung jawab sebagai provokator. Kelompok Kuyawage dengan leluasa menghilang, tidak terlibat dalam bentrokan, dan senyatanya dibiarkan saja. Mengapa TNI dan Polri tidak mengejar kelompok provokator ini? Apakah kelompok ini tidak dianggap bersalah di mata hukum? Mengapa justru penduduk desa yang menjadi sasaran kekerasan TNI dan Polri juga di saat penduduk desa dengan amat jelas meminta penghentian kekerasan dan pelaksanaan perdamaian? Mengapa TNI dan Polri menganggap inisiatif damai dari masyarakat sebagai angin lalu saja dan lebih sibuk dengan penyerangan dan pembumihangusan honai yang seakan-akan harus didahulukan? Apakah TNI dan Polri memiliki target tersendiri?

f) Kelompok TPN/OPM Ilaga dipaksa terlibat

Jika menelusuri seluruh fakta, menjadi jelas bahwa kelompok TPN/OPM yang dipimpin oleh Titus Murib, dipaksa terlibat saat Inikiapit Murib ditembak mati dan saat massa mulai melakukan penyerangan sebagai pelampiasan kemarahan terhadap TNI dan Polri. Pada awal mulanya, TPN/OPM tidak mau terlibat dengan kegiatan kelompok Kuyawage bahkan melarang dan mengusir mereka. Menjadi pertanyaan adalah mengapa kelompok Kuyawage terkesan memperlambat kematian Inikiapit untuk menarik TPN/OPM Ilaga agar terlibat dalam bentrokan?

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan pemaparan fakta dan analisis serta kesimpulan di atas, berikut ini kami sampaikan butir-butir rekomendasi yang kami anggap penting.

1. Rehabilitasi korban

Meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan santunan yang wajar dan merehabilitasi kaum korban akibat peristiwa kekerasan yang terjadi setelah 28 September 2001. Korban tersebut meliputi korban penembakan, kematian akibat pengungsian, korban pembakaran rumah/kios.

2. Rehabilitasi pemukiman penduduk, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

Meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan santunan kepada keluarga-keluarga yang mengalami kerugian akibat *honai-honai*-nya musnah akibat perusakan atau pembakaran oleh TNI atau Polri. Selain itu pemerintah daerah segera membangun kembali fasilitas umum dan sosial yang telah musnah akibat perusakan atau pembakaran oleh massa dan TPN/OPM.

3. Pengakuan atas fakta dan perlindungan terhadap masyarakat

Meminta kepada pemerintah daerah baik tingkat Provinsi Papua maupun di tingkat Kabupaten Puncak Jaya agar mengakui semua fakta kekerasan yang terjadi dan tidak menggelapkannya. Berdasarkan Amendemen Kedua UUD 1945 Pemerintah daerah di segala tingkat wajib mengambil langkah efektif untuk melindungi masyarakat dari terulangnya pola kekerasan serupa.

4. Penegakan hukum

Meminta kepada pihak Kepolisian untuk mengusut dan menindak secara hukum pelaku tindak kriminal yang telah memicu terjadinya peristiwa kekerasan yang meluas dan tidak terkendali.

5. Pembongkaran fakta

Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bentrokan dan mengambil langkah-langkah efektif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM.

6. Dialog politik

Meminta kepada Pemerintah Pusat agar memajukan dialog politik bagi penyelesaian konflik di Papua secara menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat di Papua mengingat kekerasan di Ilaga merupakan cerminan dari konflik yang tak ditangani dalam mekanisme hukum dan demokrasi sehingga tak dapat dikendalikan oleh pihak manapun.

Daftar Korban

No.	Nama	Pekerjaan	Jenis kelamin	Keterangan
1.	Kopda Harun	Anggota TNI	Laki-laki	Luka-luka
2.	Serka Maskur Adam	Anggota TNI	Laki-laki	Luka-luka
3.	Inikiapit Murip	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia
4.	Yunianus Kogoya*	-	Laki-laki	Meninggal dunia
5.	Etin Waker*	-	Laki-laki	Meninggal dunia
6.	Kelenaronuge Kogoya	Petani	Perempuan	Meninggal dunia
7.	Kenolek Murib	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia
8.	Ino Tabuni	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia
9.	Noramban Murib	Petani	Perempuan	Meninggal dunia
10.	Meriana Wanimbo*	-	Perempuan	Meninggal dunia
11.	Wendakalorinka Kogoya	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia
12.	Koroli Murib	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia
13.	Lelome Kogoya	Petani	Laki-laki	Cacat
14.	Das Kogoya	Petani	Laki-laki	Hilang
15.	Aikia Tabuni	Petani	Laki-laki	Meninggal dunia

Perincian korban:

korban di pihak aparat keamanan : 2 orang
 korban di pihak masyarakat sipil : 13 orang
 korban anak-anak (*) : 3 orang
 korban laki-laki dewasa : 10 orang
 korban perempuan dewasa : 2 orang

DAFTAR KERUGIAN MASYARAKAT DESA EROMAGA, KECAMATAN ILAGA

NO	NAMA KK	HONAI	BABI	UANG (RUPIAH)	LAIN-LAIN
1	Neles Waker	2	2	-	1 kelinci + **
2	Yaguri Waker	2	5	-	3 kelinci+ **
3	Aji-Aji Kogoya	4	2	-	+ **
4	Muguyorak Kogoya	2	2	-	+ **
5	Lerinus Waker	2	-	-	10 kelinci, 4 ayam+ **
6	Wagenggen Waker	1	4	-	5 ayam+ **
7	Demas Waker	2	5	-	6 kelinci, 7 ayam+ **
8	Barnalus Waker	2	2	500.000,-	5 kelinci, 5 ayam+ **
9	Tanius Waker	2	-	6.500.000,-	+ **
10	Peponggen Kogoya	2	8	-	2 kelinci+ **
11	Elagambi Kogoya	2	-	-	7 kelinci+ **
12	Emx Waker	3	10	-	12 kelinci, 40 ayam+ **
13	Ener Kogoya	1	5	-	6 kelinci+ **
14	Esau Kogoya	3	6	-	8 kelinci+ **
15	Teinus Waker	2	7	-	+ **
16	Isak Waker	-	2	-	-
17	Lukasi Waker	-	3	-	-
18	Jermin Kogoya	1	7	-	+ **
19	Lemar Waker	2	10	-	+ **
20	Lewi Waker	1	7	-	5 kelinci+ **
21	Nius Wanimbo	2	9	-	2 kelinci+ **
22	Hogotipo Waker	4	11	-	+ **
23	Yondiman Waker	1	-	-	+ **
24	Bininogo Waker	2	1	-	8 kelinci + **
25	Kegi Waker	1	-	-	+ **
26	Marinus Kogoya	1	6	-	+ **
27	Kores Kogoya	1	2	-	+ **
28	Nenius Kogoya	3	-	-	10 kelinci, 4 ayam+ **
29	Penias Kogoya	1	-	-	4 kelinci, 5 ayam+ **
30	Taporagangwe Kogoya	2	5	-	5 ayam+ **
31	Kianus Wonda	2	1	-	4 kelinci
32	Nano Kogoya	2	2	-	+ **
33	Kutonu Kogoya	2	-	-	-
34	Yanis Kogoya	2	1	-	6 kelinci, 7 ayam + **
35	Fes Kogoya	1	-	-	+ **
36	Kalep Kogoya	1	1	-	+ **
37	Marthen Wonda	1	-	-	+ **
38	Deyor Waker	2	5	-	7 kelinci, 10 ayam + **
39	Martinus Magai	3	-	2.000.000,-	70 kelinci, 40 ayam + **
40	Lukasi Tabuni	1	4	-	60 kelinci, 30 ayam + **
41	Yaminus Kogoya	-	3	-	18 ayam + **
42	Yuwi Kogoya	-	3	850.000,-	5 kelinci + **
43	Kaptinus Kogoya	1	2	-	4 ayam + **
44	Gutinggen Kogoya	1	-	-	+ **

45	Yosafat Murib	-	2	2.500.000,-	25 kelinci, 48 ayam + **
46	Tipulek Murib	2	5	-	+ **
47	Yonas Murib	2	5	-	1 Mesin ketik + **
48	Yarmus Murib	-	7	-	+ **
49	Kelapur Wanimbo	2	-	-	-
50	Yosef Wanimbo	1	2	-	+ **
51	Lunius Murib	1	3	-	+ **
52	Geo Murib	1	1	-	4 kelinci, 7 ayam
53	Ajipajiringa Murib	1	3	-	+ **
54	Akoringga Murib	-	-	-	3 pakaian
55	Ber Murib	1	-	-	+ **
56	Meranggan Murib	2	-	-	-
57	Ginawi Wanimbo	1	5	-	1 kelinci
58	Usay Murib	2	-	-	+ **
59	Poster Wanimbo	2	-	-	9 pakaian
60	Horopael Murib	1	-	-	-
61	Pipenus Murib	-	-	-	1 Parang
62	Kapitius Murib	3	3	-	+ **
63	Yalius Kogoya	2	1	-	+ **
64	Latier Kogoya	1	-	150.000,-	+ **
65	Naiben Murib	-	2	-	7 piring
66	Dan Murib	1	5	-	+ **
67	Yance Murib	1	-	-	+ **
68	Atelius Kogoya	1	2	-	+ **
69	Buhu Murib	1	1	-	+ **
70	Elies Kogoya	-	-	-	+ **

Catatan: + ** = Kerugian lain seperti alat-alat /perabot rumah tangga, alat pertanian yang tidak terhitung jumlahnya.

KETERANGAN LENGKAP DENAH ILAGA

A	DESA KAGO - PUSAT KECAMATAN	B	DESA EROMAGA
1	Pos Yonif 753	28	Honai Klasis GKII
2	Jalan Desa Kimak	29	Gudang Bahan Bakar
3	Kantor Camat	30	Klasis GKII
4	Kantor Koramil	31	Gudang Klasis
5	Lapangan Sepak Bola	32	Koperasi/ PT.
6	Rumah Camat	33	Poliklinik
7	Rumah Masyarakat	34	Radio SSB
8	Gedung SMP Kago	35	Rumah Guru STP/STA
9	Perumahan Pegawai Kecamatan	36	Kantor Agen MAF
10	PUSKESMAS dan Rumah Dokter	37	Rumah Pendeta Kaleb Murib
11	Mesjid dan Polsek Ilaga	38	Bekas Rumah Larzon
12	Pasar Ilaga	39	Rumah Guru STP/STA
13	Gereja Katolik Kago	40	Honai Masyarakat Eromaga
14	Rumah Pegawai Kecamatan	41	Gereja GKII Eromaga
15	Pos & Giro dan BPD	42	Honai Pelajar STP/STA
16	Lapangan Terbang Lama dan TKP Penembakan	43	Gedung STP/STA
17	Kuburan	**	
18	Rumah Ligranggen Tabuni		
19	Kampung Jilame		
20	Rumah Lelome Kogoya		
21	Rumah Masyarakat		
22	Rumah Chosmas Wakerkwa, Leo Wakerkwa dan Muguren Tabuni		
23	Kampung Nipuralame (barat)		
24	Kampung Nipuralame (timur)		
25	Perumahan Guru-guru SD Inpres Kago		
26	Gedung SD Inpres Kago		
27	Telaga		